

**PERAN *WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL* (WFWI) DALAM
MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER DI AFGHANISTAN
PASCA PENGAMBILALIHAN OLEH TALIBAN TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AISYAH FARAHANNA

21323134

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**PERAN *WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL* (WFWI) DALAM
MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER DI AFGHANISTAN
PASCA PENGAMBILALIHAN OLEH TALIBAN TAHUN 2021-2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AISYAH FARAHANNA

21323134

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN *WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL* (WFWI) DALAM
MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER DI AFGHANISTAN
PASCA PENGAMBILALIHAN OLEH TALIBAN TAHUN 2021-2024**
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat **Sarjana S1 Hubungan Internasional**

Pada Tanggal

13 November 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dosen Penguji

1. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
3. Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D

Tanda Tangan

Karina
Masitoh
Irawan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 13 November 2025



Aisyah Farahanna

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	14
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	14
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	14
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2	16
<i>WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL</i> DAN KETIDAKSETARAAN GENDER DI AFGHANISTAN	16
2.1. Ketidaksetaraan Gender Terhadap Perempuan di Afghanistan sejak 2021	16
2.2. Posisi <i>Women for Women International</i> di Afghanistan	20
BAB 3	22
3.1. Peran <i>Relief</i> Oleh <i>Women For Women International</i> Pada Isu Gender Di Afghanistan	23
3.2. Peran <i>Social and Economic Roles</i> oleh <i>Women for Women International</i> di Afghanistan	26
3.3. Peran <i>Political Roles</i> oleh <i>Women for Women International</i> di Afghanistan	30
<i>3.3.1 Advocacy and lobbying</i>	31
<i>3.3.2 Public Education and Consciousness Raising</i>	36

3.3.3 <i>Agenda Setting</i>	39
BAB 4	44
4.1. Kesimpulan	44
4.2 Rekomendasi	49
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Indikator Teori Ahmed dan Potter (2006) dan Penerapan oleh WFWI di
Afghanistan 61

ABSTRAK

Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021 menyebabkan peningkatan kerentanan sosial dan ekonomi bagi perempuan Afghanistan. Dalam situasi tersebut, *Women for Women International* (WFWI) berperan penting sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada bantuan kemanusiaan dan pemberdayaan perempuan. Menggunakan pendekatan multi-teoretis dari Ahmed dan Potter, penelitian ini menganalisis peran WFWI dalam tiga aspek utama yaitu: *relief, social and economic roles* dan *political roles*. WFWI melaksanakan peran *relief* melalui pemberian bantuan dasar dan dukungan psikososial bagi perempuan terdampak konflik, serta peran sosial dan ekonomi melalui program *Stronger Women, Stronger Nations* untuk meningkatkan kemandirian perempuan. Pada aspek politik, WFWI aktif melakukan advokasi internasional dan kerja sama dengan lembaga global seperti PBB. Upaya tersebut menunjukkan bahwa WFWI berkontribusi nyata dalam memperjuangkan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.

Kata-kata kunci: Women for Women International, Afghanistan, NGO, Ahmed dan Potter, kesetaraan gender.

ABSTRACT

The Taliban's 2021 takeover increased social and economic vulnerability for Afghan women. In this context, *Women for Women International* (WFWI) plays a crucial role as a non-governmental organization focusing on humanitarian aid and women's empowerment. Using Ahmed and Potter's *multi-theoretical approach*, this study analyzes WFWI's roles in three main aspects: *relief, social and economic roles*, and *political roles*. WFWI performs its *relief* role through basic aid and psychosocial support for women affected by conflict, and its social and economic roles through the *Stronger Women, Stronger Nations* program that enhances women's independence. Politically, WFWI engages in international advocacy and cooperation with global institutions such as the United Nations. These efforts demonstrate that WFWI significantly contributes to promoting gender justice and women's empowerment in Afghanistan.

Keywords: Women for Women International, Afghanistan, NGO, Ahmed and Potter, gender equality.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi di berbagai negara dan menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling umum. Berbagai bentuk pembatasan terhadap pendidikan, pekerjaan, keamanan dan partisipasi publik menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi ketidaksetaraan gender di banyak konteks sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa isu perlindungan hak perempuan tetap menjadi perhatian global dan mencerminkan kegagalan banyak negara dalam memberikan perlindungan yang memadai (Putri 2022).

Salah satu negara yang masih memiliki tingkat diskriminatif yang cukup tinggi terhadap perempuan adalah Negara Afghanistan (Down To Earth 2023). Afghanistan merupakan negara yang berada di bagian Selatan Benua Asia. Meski disebut dengan negara berkembang, Afghanistan sendiri masih menghadapi masalah ketidaksetaraan gender bagi para perempuan yang tinggal di negara tersebut. Perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi akibat konstruksi sosial patriarkal. Namun, perempuan penyandang disabilitas berada dalam posisi yang jauh lebih rentan karena mereka mengalami diskriminasi berlapis baik sebagai perempuan maupun sebagai penyandang disabilitas yang membatasi akses mereka terhadap layanan dasar, partisipasi sosial, serta perlindungan dari kekerasan (Human Rights Watch 2020). Keadaan ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih menggunakan pemikiran patriarki

dimana laki-laki dianggap lebih kuat dari perempuan. Sudah sejak lama perempuan di Afghanistan mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan para laki-laki. Mereka para perempuan mengalami penderitaan akibat adanya diskriminasi tersebut. Hal itu terjadi saat pertama kali Taliban menguasai wilayah Afghanistan pada tahun 1990-an sebelum akhirnya terusir oleh pasukan Amerika Serikat (Azria and Ramayani 2022).

Perang antara Amerika Serikat dan Kelompok Taliban terjadi hampir sebulan setelah adanya serangan pada tanggal 11 September 2001. Selanjutnya terjadi perundingan antara kelompok Taliban dengan Amerika Serikat di tahun 2018. Setelah itu, di tahun 2020, kesepakatan antara kelompok Taliban dan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata terjadi dan Taliban menandatangani perjanjian untuk melakukan perdamaian dengan Amerika Serikat serta bernegosiasi mengenai pembagian kekuasaan dengan pemerintahan Negara Afghanistan. Namun, pada 15 Agustus 2021, Taliban telah berhasil menguasai kembali seluruh wilayah Afghanistan untuk yang kedua kalinya (Azria and Ramayani 2022). Kelompok Taliban merupakan sebuah kelompok yang menjanjikan sebuah perdamaian dan keamanan di wilayah Afghanistan berdasar pada Syariah Islam mereka (BBC 2022).

Sejak Taliban kembali berkuasa, banyak para perempuan yang takut akan pemerintahan yang baru akan mempengaruhi kehidupan mereka, namun kini ketakutan mereka terjadi. Ketidakadilan terhadap perempuan di Afghanistan semakin marak terjadi. Banyaknya peraturan yang diciptakan untuk gender tertentu, menyebabkan perempuan di Afghanistan mengalami banyak kesulitan untuk memperoleh hak-hak mereka dalam berbagai macam aspek, dari pendidikan,

politik, kesehatan, dan masih banyak lagi (Human Rights Watch 2024). Perempuan di negara tersebut dinilai sangat rendah karena dianggap tidak dapat berjuang untuk menghasilkan uang seperti para laki-laki. Perempuan di Afghanistan juga mengalami kekerasan seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan lain sebagainya (BBC 2022).

Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan di Afghanistan berada dalam kondisi yang semakin terpinggirkan dan kehilangan ruang untuk menjalankan hak-hak dasarnya. Berbagai pembatasan yang diberlakukan Taliban tidak hanya menghambat akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial, tetapi juga melemahkan posisi mereka dalam pembangunan dan kehidupan sehari-hari (International Crisis Group 2023). Di tengah lemahnya perlindungan negara terhadap hak perempuan, peran aktor internasional yang memberikan dukungan langsung menjadi sangat penting untuk memastikan perempuan tetap memiliki ruang aman dan kesempatan untuk memberdayakan dirinya. Dalam konteks inilah upaya *Women for Women International* di Afghanistan menjadi relevan untuk dipahami, terutama dalam melihat bagaimana program-program pemberdayaan dapat memberikan jalan keluar bagi perempuan yang hidup di bawah pembatasan yang semakin ketat (UN Women 2022)

Kehidupan para perempuan di Afghanistan berjalan normal seperti kehidupan pada umumnya sebelum dikuasai oleh kelompok Taliban. Mereka pergi bekerja, bersekolah, bahkan ikut serta di dunia politik. Tidak ada perintah untuk menutup wajah saat bekerja, tidak ada larangan untuk mengemudi, dll. Hidup mereka bisa dikatakan sempurna seperti perempuan di negara-negara lain. Namun setelah Negara Afghanistan diambil alih oleh Taliban, perempuan di sana banyak

mendapat larangan yang tidak logis pada tahun 2021 hingga 2022, Taliban membuat banyak sekali peraturan untuk para perempuan. Seperti, larangan untuk berdemonstrasi demi mendapatkan kembali hak-haknya, larangan bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan kompetisi olahraga, para jurnalis perempuan yang dilarang untuk bekerja, memisahkan siswi perempuan dan laki-laki di Universitas, lalu melarang siswi menengah untuk bersekolah, dan masih banyak lagi (Amnesty International 2022). Larangan-larangan tersebut tentu menyulitkan para perempuan terutama para perempuan yang memiliki keluarga karena harus mencari nafkah. Kehidupan perempuan di sana sangat berubah sejak kembali dikuasai oleh Taliban. Mereka sangat berputus asa karena merasa tidak dapat meraih apa yang mereka impikan (BBC 2022).

Kasus mengenai diskriminasi atau ketidakadilan terhadap perempuan di beberapa negara sudah pasti menarik mata masyarakat dari seluruh dunia dan juga organisasi internasional yang mengurus permasalahan mengenai hak-hak perempuan. Terdapat banyak organisasi internasional yang menangani isu seperti ini, salah satunya adalah *Women for Women International* (WFWI). Hadirnya Organisasi WFWI di beberapa negara menjadi salah satu bantuan yang sangat penting untuk memberdayakan perempuan disana. Beberapa negara yang mendapat bantuan pemberdayaan perempuan dari Organisasi WFWI adalah Kongo, Iraq, Kosovo, Nigeria, Palestina, Rwanda, Sudan, Bosnia dan Herzegovina, dan salah satunya adalah Afghanistan (Women for Women International, n.d.-d). WFWI atau singkatan dari *Women for Women International* merupakan sebuah organisasi Non-Pemerintah yang berdiri sendiri dari negara Amerika Serikat yang telah membantu

beberapa provinsi di Negara Afghanistan sejak tahun 2002 (Women for Women International 2023).

Organisasi *Women for Women International* merupakan satu-satunya *International Non-Government Organization (INGO)* yang dipersembahkan atau dibangun untuk memberdayakan para perempuan guna mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan para perempuan yang ada di beberapa negara termasuk Afghanistan (Septiadi 2019). Organisasi *Women for Women International* ini sendiri telah diakui secara internasional karena telah membantu banyak negara di dunia melalui program-program yang mereka lakukan. Organisasi ini bekerja secara global guna mewujudkan visi tujuan pembangunan berkelanjutan bagi para perempuan dan juga anak perempuan serta mendukung sebuah kesetaraan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga memiliki dampak terhadap sosio-ekonomi yang cukup besar. Adanya pemberdayaan perempuan di suatu negara, akan mendorong pertumbuhan ekonomi disana. Tetapi, diskriminasi gender masih sangat sering terjadi di beberapa negara dan masih berlanjut hingga saat ini (UN Women, n.d.).

Selain mencerminkan ketidaksetaraan gender yang semakin memburuk di Afghanistan, situasi ini juga menegaskan pentingnya upaya pemberdayaan perempuan sebagai strategi untuk mengurangi dampak penindasan struktural yang diberlakukan oleh Taliban. Pemberdayaan perempuan merupakan proses memperkuat kapasitas perempuan untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi, partisipasi publik, serta kemampuan mengambil keputusan dalam kehidupannya (UN Women 2022). Hal ini sejalan dengan laporan UNDP

yang menekankan bahwa peningkatan keterampilan ekonomi dan akses terhadap ruang pengambilan keputusan merupakan elemen kunci bagi perempuan yang hidup dalam situasi krisis dan rezim represif (UNDP 2023). Konsep ini relevan dalam konteks Afghanistan karena banyak program WFWI secara langsung menargetkan peningkatan kemandirian ekonomi dan sosial perempuan sebagai respons terhadap pembatasan Taliban. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dalam melihat bagaimana WFWI berupaya mengatasi ketidaksetaraan gender di Afghanistan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya *Women for Women International* (WFWI) dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di Afghanistan pada tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran serta fungsi dari organisasi *Women for Women International* (WFWI) dalam upaya pemberdayaan perempuan dan upaya mengatasi isu ketidaksetaraan gender di Negara Afghanistan.
2. Untuk menganalisis program dan inisiatif apa saja yang telah dilaksanakan oleh organisasi *Women for Women International* (WFWI) di Afghanistan.

1.4 Cakupan penelitian

Sejak kelompok Taliban berkuasa kembali, kasus diskriminasi gender di Afghanistan semakin marak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah Negara Afghanistan sendiri tidak dapat melakukan apa-apa karena pemerintahannya telah diambil alih oleh kelompok Taliban tersebut. Isu tersebut telah menarik perhatian dari organisasi pemberdayaan perempuan dari Amerika Serikat yaitu *Women for Women International*. WFWI berupaya untuk membantu mendapatkan kembali hak-hak para perempuan di Afghanistan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai apa saja program yang telah dilakukan atau sedang dilakukan oleh WFWI di Negara Afghanistan.

Alasan mengapa mengambil tahun 2021 hingga 2024 adalah karena isu ini kembali terjadi pada tahun 2021 setelah Kelompok Taliban berhasil merebut kembali kekuasaan di Negara Afghanistan dan masih berlangsung hingga tahun 2024. Pada tahun tersebut juga, WFWI membuat beberapa program untuk para perempuan di Afghanistan untuk membantu mengembalikan hak-hak perempuan di sana. *Women for Women International* (WFWI) karena organisasi ini merupakan satu-satunya INGO yang memberikan pelatihan sosial-ekonomi langsung kepada perempuan Afghanistan sejak 2002. Meski berbagai INGO memiliki fokus yang beragam, WFWI mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan bantuan darurat, pendampingan psikososial dan pemberdayaan jangka panjang bagi perempuan penyintas konflik. Pendekatan komprehensif inilah yang menjadikan WFWI aktor paling relevan untuk dianalisis dalam konteks upaya mengatasi ketidaksetaraan gender pada periode 2021–2024.

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk penelitian pertama oleh Gilang Agung Septiadi menjelaskan terkait strategi dari organisasi *Women for Women International* (WFWI) dalam memberdayakan perempuan di Afghanistan pada kurun tahun 2013 hingga 2017. Pemberdayaan perempuan tersebut dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan juga partisipasi dalam membuat keputusan. Peneliti menyoroti pentingnya melibatkan laki-laki dalam upaya menjalankan program-program yang dilakukan oleh *Women for Women International* terhadap para perempuan (Septiadi 2019).

Kemudian, untuk penelitian kedua, penulis mengambil jurnal yang ditulis oleh Rafika Wahyu Andani bersama para rekannya yang menjelaskan terkait bahwasanya kekerasan terhadap para perempuan di Afghanistan selama kekuasaan Taliban yang berfokus terhadap kekerasan langsung dan juga kultural yang dialami para perempuan disana. Jurnal ini juga membahas mengenai aturan-aturan Taliban yang diciptakan untuk kaum perempuan sampai menggunakan kekerasan langsung dan kekerasan budaya untuk mengisolasi perempuan dari kehidupan modern (Andani 2022).

Untuk penelitian ketiga, penulis mengambil jurnal yang ditulis oleh Tsabitah Rizki Ekanoviarini dan rekannya Aji Wibowo, tulisan tersebut menjelaskan mengenai pelanggaran hak perempuan di Negara Afghanistan selama kekuasaan rezim Taliban berdasarkan konvensi CEDAW. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab yang bisa diberikan kepada para perempuan sebagai korban, termasuk juga pemulihan, kompensasi, serta memberi saran kepada pemerintah Negara Afghanistan guna mewujudkan kewajiban mereka (pemerintah)

dalam melakukan perlindungan perempuan dan juga mengadili pelanggaran HAM secara adil (Ekanoviarini and Wibowo 2022).

Dari ketiga penelitian yang telah ditinjau, dapat diketahui bahwa penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis buat, yaitu membahas mengenai isu ketidaksetaraan gender di Negara Afghanistan setelah Taliban berkuasa. Tetapi, terdapat perbedaan serta pembaharuan yang penulis buat, untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada tahun 2021 hingga tahun 2024 dan berfokus pada upaya yang dilakukan oleh organisasi *Women for Women International* (WFWI) mengenai isu ini, guna mengetahui bagaimana perkembangan dari upaya yang dilakukan di Afghanistan tersebut terhadap para perempuan beberapa tahun belakangan ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam membahas bagaimana upaya organisasi *Women for Women International* (WFWI) dalam memberdayakan perempuan atau memperjuangkan kesetaraan gender di Negara Afghanistan, penulis menggunakan konsep *NGOs and Human Rights : Women's Rights at the UN* dalam buku *NGOs in International Politics* yang ditulis oleh Shamima Ahmed dan David M. Potter (Ahmed and M. Potter 2006). Teori ini dipilih karena menyediakan kerangka analitis untuk memahami peran NGO dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan, sehingga relevan untuk mengkaji kontribusi WFWI dalam upaya kesetaraan gender di Afghanistan. Secara umum dan diketahui oleh kebanyakan orang, organisasi internasional merupakan tempat untuk menghimpun negara-negara di dunia guna melakukan suatu kerjasama yang memiliki tujuan yang sama.

Pada buku “*NGOs in International Politics*” yang ditulis oleh Shamima Ahmed dan David M. Potter, dijelaskan bahwa terdapat 3 peran penting sebuah Organisasi Internasional dari sub-bab peran organisasi internasional non-pemerintah dalam Politik Internasional, yaitu, *Relief*, *Social and Economic Roles*, dan *Political Roles*. Pada tulisan ini, penulis akan menjelaskan secara jelas apa saja poin-poin tersebut:

1. *Relief*

Organisasi Non-Pemerintah memiliki peran yang penting dalam acara amal dan bantuan kemanusiaan. Organisasi seperti ini biasanya didirikan oleh individu atau kelompok untuk membela kepentingan, memastikan keadilan, ataupun mempromosikan sebuah kebijakan yang baru (Ahmed and Potter 2006, 38).

2. *Social and Economic Development*

Selain *Relief*, Organisasi Non-Pemerintah maupun Pemerintah memikirkan sebuah hal yang dapat memberikan dampak jangka panjang seperti bantuan pembangunan sosial dan juga ekonomi (menyalurkan bantuan) (Ahmed and Potter 2006, 40).

3. *Political Roles*

Semakin banyak organisasi yang memiliki tujuan atau peran dalam politik, seperti:

- a. *Advocacy and Lobbying*

Lobbying merupakan fungsi umum dari Organisasi Non-Pemerintah Hak Asasi Manusia. Dimana mereka melakukan lobi untuk mendorong ratifikasi perjanjian dan menekan pemerintah yang melanggar Hak Asasi Manusia (Ahmed and Potter 2006).

- b. *Public Education and Consciousness Raising*

Organisasi Non-Pemerintah sangat sering menggunakan pendidikan publik serta peningkatan kesadaran sebagai alat demi mencapai tujuan mereka. Melalui penyebaran informasi, NGO bisa mempengaruhi opini publik, mendidik pemerintah, dan menginspirasi aksi global. Selain itu, NGO juga sering berbagi pengetahuan di antara sesama anggota. NGO juga berperan penting dalam pembentukan agenda politik internasional serta mendorong perubahan sosial (Ahmed and Potter 2006, 46-48).

c. *Agenda Setting*

Organisasi Non-Pemerintah memainkan peran yang penting dalam pembentukan agenda politik melalui pendidikan publik serta advokasi. Mereka dapat menempatkan suatu isu seperti isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup pada agenda kebijakan global. NGO tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam perubahan sosial (Ahmed and Potter 2006, 48-50).

d. *Monitoring Other Transnational Actors*

Organisasi Non-Pemerintah juga memiliki peran pengawasan serta memastikan pemerintah, perusahaan multinasional, dan juga organisasi internasional untuk selalu bertanggung jawab atas segala tindakan mereka. Serta memantau implementasi perjanjian internasional, potensi pelanggaran HAM dan praktik operasional perusahaan yang dianggap tidak bertanggung jawab. NGO berperan menjadi pengawas yang kritis

dan juga mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan (Ahmed and Potter 2006, 50-52).

e. *Agenda Setting in the Global Decision-Making Arena*

Peran terakhir yaitu penetapan agenda dalam arena pengambilan keputusan global dimana organisasi mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan proses penetapan agenda. NGO ini sendiri dapat mengakses informasi, hadir dalam pertemuan, serta berinteraksi dengan para delegasi. Melalui kapasitas tersebut NGO mengusulkan agenda dengan menyampaikan laporan penelitian, rekomendasi kebijakan dan hasil pemantauan lapangan serta melakukan advokasi dan lobi langsung kepada para pembuat keputusan (Ahmed and Potter 2006, 53).

Berdasarkan poin yang telah dijelaskan, ketiga poin diatas relevan dengan organisasi *Women for Women International* (WFWI). Namun, pada poin ketiga yaitu *Political Roles*, hanya tiga peran yang dapat dikaitkan dengan WFWI, yaitu, *Advocacy and lobbying, Public Education and Consciousness Raising, dan Agenda Setting*. Organisasi *Women for Women International* (WFWI) sebagai organisasi internasional non-pemerintah sudah menjadi kewajibannya mempunyai peran untuk membantu para perempuan di Negara Afghanistan. Oleh karena itu, dengan teori ini, penulis akan menganalisis bagaimana peran atau upaya dari *Women for Women International* (WFWI) dalam menangani kasus kesetaraan gender di Afghanistan pada tahun 2021 hingga 2024 ini.

1.7 Argumen Sementara

Argumen utama dari tulisan ini adalah bahwa *Women for Women International* (WFWI) berperan penting dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di Afghanistan melalui tiga fungsi utama NGO dalam isu HAM sebagaimana dijelaskan oleh Shamima Ahmed dan David M. Potter. Peran tersebut terlihat dari kontribusi WFWI dalam memberikan bantuan kemanusiaan, mendukung pembangunan sosial-ekonomi perempuan, serta melakukan advokasi politik di tingkat global.

Isu ketidaksetaraan gender di Afghanistan telah berlangsung lama dan memburuk sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021, menunjukkan bahwa upaya pemerintah Afghanistan sebelumnya belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, WFWI sebagai organisasi internasional berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui berbagai program untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Dengan menggunakan konsep *NGOs and Human Rights: Women's Rights at the UN* dari Ahmed dan Potter, tulisan ini menjelaskan bahwa WFWI menjalankan tiga peran utama NGO dalam isu HAM. Pertama, *Relief* yakni program yang membantu perempuan membangun kembali kehidupan mereka. Kedua, *Social and Economic Development* yaitu program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas perempuan. Ketiga, *Political Roles* yang mencakup aktivitas advokasi dan lobi, pendidikan publik, serta penetapan agenda untuk mendorong kembali pengakuan hak-hak perempuan di Afghanistan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penulis melakukan studi pustaka. Terdapat beberapa sumber dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal, buku, dan juga *website* resmi yang terpercaya.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang akan diteliti oleh penulis adalah organisasi *Women for Women International* (WFWI). Sedangkan objek dari penelitian ini yaitu peran dan upaya mengatasi ketidaksetaraan gender serta pemberdayaan perempuan di Negara Afghanistan pada tahun 2021 hingga tahun 2024.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi mengenai isu ini adalah dengan menggunakan metode literatur. Dalam metode ini, penulis mencari berbagai informasi yang terpercaya melalui jurnal, buku, ataupun *website* resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis menentukan tema dan juga judul mengenai apa yang ingin dibahas setelah itu mempertimbangkan isi dari rumusan masalah, tinjauan pustaka, serta teori apa yang sesuai dengan judul atau topik yang dibahas. Lalu, penulis mencari sumber-sumber seperti jurnal, surat kabar, serta *website* resmi terpercaya dan melakukan proses analisis data yang bertujuan untuk menyusun tulisan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I pada penelitian ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Lalu, Bab II dalam penelitian ini akan berisi mengenai organisasi *Women for Women International* dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Afghanistan pasca pengambilalihan wilayah oleh Taliban tahun 2021-2024.

Pada bab III, penelitian akan berisi mengenai peran *Women for Women International* (WFWI) dalam menangani ketidaksetaraan gender di Afghanistan tahun 2021-2024 dengan menjelaskan teori pada sub-bab peran organisasi internasional non-pemerintah dalam Politik Internasional dalam buku *NGOs and Human Rights* yang dikemukakan oleh Shamima Ahmed dan David M. Potter yaitu *Relief, Social and Economic Roles*, dan *Political Roles*.

Terakhir pada bab IV, penelitian akan berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian penulis dan rekomendasi penelitian.

BAB 2

***WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL* DAN KETIDAKSETARAAN GENDER DI AFGHANISTAN**

2.1. Ketidaksetaraan Gender Terhadap Perempuan di Afghanistan sejak 2021

Afghanistan telah mengalami lebih dari empat dekade konflik dengan tatanan masyarakat yang sangat patriarkis. Perempuan memiliki sangat sedikit kekuasaan; kekerasan terhadap perempuan bersifat endemik dan berbagai praktik berbahaya seperti honour killing, pernikahan anak secara paksa, hingga penukaran perempuan untuk menyelesaikan sengketa masih sangat lazim terjadi (Gibbs et al. 2018). Kondisi ketidaksetaraan gender terhadap perempuan yang sudah mengakar ini semakin memburuk secara drastis sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021. Rezim Taliban menerapkan serangkaian aturan diskriminatif yang pada dasarnya menyingkirkan perempuan dari kehidupan publik. Taliban melarang anak perempuan untuk bersekolah di atas kelas 6 serta melarang perempuan untuk bekerja di sebagian sektor pekerjaan serta mewajibkan perempuan untuk mematuhi kode busana Islam yang sangat ketat ketika berada di luar rumah. Perempuan Afghanistan juga dibatasi kebebasannya dalam bergerak, tidak boleh bepergian jarak jauh tanpa ada pendamping laki-laki (mahram), bahkan ada larangan untuk mengunjungi tempat-tempat umum seperti taman hingga tempat berolahraga (pusat kebugaran). Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Taliban berupaya untuk menghapus peran perempuan dari ruang publik Afghanistan (RFE/RL 2025).

Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan Taliban adalah dalam sektor pendidikan. Sejak Maret 2022, Taliban secara resmi menutup akses pendidikan menengah bagi anak perempuan dan pada akhir 2022 larangan ini diperluas hingga ke perguruan tinggi. Menurut data UNESCO setidaknya 1,4 juta anak perempuan Afghanistan telah secara sengaja dikeluarkan dari sekolah menengah sejak 2022 (UNESCO 2024). Angka tersebut terus bertambah seiring setiap tahunnya lebih banyak anak perempuan mencapai usia dilarang sekolah. Akibatnya, Afghanistan menjadi satu-satunya negara di dunia yang melarang pendidikan bagi perempuan di jenjang menengah dan tinggi. Hampir 80% anak perempuan usia sekolah di Afghanistan kini tidak dapat menikmati hak pendidikannya. Dalam kurun tiga tahun, rezim de facto Taliban praktis memundurkan capaian pendidikan perempuan dua dekade ke belakang, mengancam hilangnya satu generasi penuh perempuan terdidik di Afghanistan. Hilangnya akses pendidikan ini tidak hanya melanggar hak asasi, tetapi juga menutup peluang masa depan perempuan dan berdampak serius bagi pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang negara (UNESCO 2024).

Di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan eksklusi perempuan dari dunia kerja menyebabkan kemunduran besar. Partisipasi angkatan kerja perempuan Afghanistan anjlok hingga sekitar 5% saja pada tahun 2024 dan menjadi salah satu yang terendah di dunia (Sandra 2025). Larangan bekerja bagi perempuan baik di pemerintahan, sektor swasta, maupun organisasi non-pemerintah membuat banyak dari mereka kehilangan mata pencaharian. Kebijakan ini berimplikasi serius terhadap ekonomi nasional. PBB memperkirakan bahwa pembatasan perempuan dalam bekerja menimbulkan kerugian ekonomi hingga \$1 miliar per tahun (Najafizada 2021). Hilangnya kontribusi perempuan membuat ekonomi

Afghanistan semakin terpuruk dan mendorong jutaan keluarga ke jurang kemiskinan, kini banyak keluarga kehilangan pendapatan istri sehingga tingkat kemiskinan rumah tangga melonjak (Medica Mondiale 2023). Secara keseluruhan, kombinasi larangan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan telah membuat sebagian besar perempuan Afghanistan kehilangan akses terhadap kesempatan ekonomi maupun pelatihan keterampilan sejak 2021 hal ini dengan sangat jelas memundurkan posisi perempuan dalam masyarakat secara signifikan (RFE/RL 2025).

Dampak kebijakan Taliban juga dirasakan pada sektor kesehatan dan keselamatan jiwa perempuan, pelarangan bagi perempuan untuk bekerja di pelayanan kesehatan serta aturan wajib pendamping pria saat bepergian membuat akses perempuan terhadap layanan medis sangat terbatas. Kondisi ini berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu di Afghanistan, yang merupakan salah satu yang terburuk di dunia. UNFPA mencatat setiap dua jam satu perempuan Afghanistan meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan yang sebenarnya dapat dicegah. Larangan Taliban terhadap pendidikan kedokteran bagi perempuan dan berpraktik sebagai tenaga kesehatan perempuan diproyeksikan memperburuk krisis ini. PBB memprediksi bahwa pada tahun 2026 nantinya, dampak dikeluarkannya lebih dari 1 juta anak perempuan dari sekolah dan 100 ribu perempuan dari universitas akan berujung pada kenaikan 50% angka kematian ibu di Afghanistan (Ziaei 2024).

Dengan kata lain kebijakan Taliban di sektor pendidikan dan pekerjaan perempuan ibarat menandatangani surat kematian bagi banyak perempuan Afghanistan karena ketiadaan tenaga dokter perempuan dan pembatasan layanan

kesehatan akan meningkatkan risiko kematian ibu secara drastis (United Nations 2024). Kondisi ini diperparah dengan ditutupnya Kementerian Urusan Perempuan dan rumah aman bagi korban kekerasan yang kemudian menyebabkan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau ancaman kekerasan nyaris tidak memiliki lagi tempat pengaduan atau perlindungan resmi lagi (Medica Mondiale 2023).

Selain sektor pendidikan dan pekerjaan, kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi perempuan semakin sulit dicegah di bawah rezim Taliban. Kerangka hukum perlindungan perempuan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (EVAW Law) tidak lagi diakui dan banyak pelaku kekerasan terhadap perempuan justru dibebaskan oleh Taliban (Medica Mondiale 2023). Survei nasional *Afghanistan Demographic and Health Survey 2015* mencatat 80% perempuan dan 72% laki-laki setuju bahwa suami dibenarkan memukul istri dalam kondisi-kondisi tertentu. Studi lain menemukan sekitar 52% perempuan pernah mengalami kekerasan fisik oleh pasangannya dan 39% mengalami kekerasan fisik dalam setahun terakhir. Di bawah Taliban, peluang perempuan untuk mencari pertolongan hukum atau layanan pendukung kian mengecil, sehingga kerentanan mereka terhadap kekerasan domestik dan pernikahan paksa semakin meningkat (Gibbs et al. 2018).

Laporan *Amnesty International* pada 2023 menunjukkan bahwa angka pernikahan anak dan pernikahan paksa di Afghanistan meningkat sejak Taliban berkuasa, seiring krisis ekonomi yang membuat keluarga miskin merasa terpaksa menikahkan anak perempuan mereka demi mahar atau demi melindungi mereka dari dinikahi paksa oleh anggota Taliban (Medica Mondiale 2023). Dengan

demikian, rezim Taliban tidak hanya mencabut hak-hak dasar perempuan di ranah publik, tetapi juga memperparah ketidaksetaraan dan kekerasan berbasis gender dalam kehidupan sehari-hari perempuan Afghanistan. Ketimpangan gender yang terjadi di Afghanistan pasca-2021 jelas memerlukan perhatian dan respons serius. Kebijakan Taliban yang menyingkirkan perempuan dari pendidikan, pekerjaan dan ruang publik telah menciptakan krisis hak perempuan terburuk di dunia saat ini. Kondisi ini juga berdampak luas pada masa depan pembangunan Afghanistan, karena menihilkan peran setengah dari populasi dalam Masyarakat (*Women for Women International*, n.d.-d).

2.2. Posisi *Women for Women International* di Afghanistan

Women for Women International (WFWI) telah hadir di Afghanistan sejak tahun 2002 sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan penyintas konflik. Pada periode sebelum Taliban kembali berkuasa, WFWI relatif diterima oleh pemerintah Republik Afghanistan karena program-programnya dianggap sejalan dengan agenda pembangunan nasional, terutama penguatan ekonomi perempuan dan dukungan sosial bagi korban perang. Keberadaan WFWI juga mendapat dukungan dari komunitas internasional dan masyarakat lokal terutama di wilayah Kabul, Nangarhar, dan Parwan yang menjadi lokasi utama implementasi program (UN Women 2025).

Namun, posisi WFWI mengalami perubahan signifikan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus 2021. Taliban menerapkan pembatasan ketat terhadap organisasi internasional, khususnya yang mempekerjakan atau mendampingi perempuan. Untuk mempertahankan operasionalnya WFWI harus beradaptasi dengan bekerja sama melalui jaringan lokal, memodifikasi metode

pendampingan, dan menyesuaikan aktivitas agar tetap dapat memberikan layanan tanpa melanggar aturan Taliban. Beberapa program dialihkan ke format tidak langsung, seperti *remote support* dan pelatihan berbasis komunitas guna menghindari larangan berkumpul (UNAMA 2023).

Secara sosial, WFWI masih diterima oleh kelompok perempuan dan komunitas lokal yang memandang organisasi ini sebagai salah satu dari sedikit aktor internasional yang masih bertahan setelah perubahan rezim. Namun secara politik, WFWI menghadapi tantangan besar karena Taliban tidak sepenuhnya menerima aktivitas yang melibatkan pemberdayaan perempuan. Akibatnya, WFWI berada dalam posisi sensitif: diterima oleh masyarakat, tetapi harus berhati-hati di bawah pemerintahan Taliban yang membatasi kegiatan berbasis gender (Human Rights Watch 2023)

BAB 3

PERAN WFWI DALAM MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER MELALUI TEORI NGOs *INTERNATIONAL POLITICS*

Dalam bab 3 pada tulisan ini, penulis akan membahas mengenai upaya atau peran yang dilakukan oleh *Women for Women International* (WFWI) dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di Afghanistan dengan menulis menggunakan pendekatan multi-teoretis berdasarkan apa yang telah ditulis dalam buku *NGOs in International Politics* oleh Shamima Ahmed dan David M Potter. Pada bab 3 dengan sub bab ‘*NGOs Roles in International Politics*’ di dalam buku tersebut, menjelaskan mengenai adanya 3 peran dari NGO atau LSM, yaitu *Relief*, *Social and Economic roles*, dan *political roles*.

Relief merupakan bantuan langsung jangka pendek yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan dalam situasi krisis, seperti makanan, uang tunai, perlindungan, atau dukungan psikososial. Dalam konteks WFWI, *relief* diberikan melalui program “*Crisis Response*” yang menyediakan bantuan tunai darurat sebesar USD 30–60 per bulan kepada tiap perempuan Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada 2021. Bantuan ini diberikan selama 3–6 bulan kepada peserta program lama maupun perempuan yang terdampak pembatasan baru, untuk memastikan mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar ketika kehilangan penghasilan (Women For Women International 2022).

Peran sosial-ekonomi merujuk pada upaya meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dukungan komunitas, dan akses terhadap pendapatan. WFWI menjalankan program pelatihan sosial-ekonomi selama 12 bulan, dengan pertemuan mingguan, yang mencakup

keterampilan seperti menjahit, pertanian rumah tangga, pengelolaan keuangan, dan kewirausahaan dasar. Peserta program adalah perempuan usia 18–55 tahun yang berasal dari komunitas berisiko tinggi dan kepala keluarga perempuan. Selama pelatihan, mereka menerima “*monthly stipend*” sebesar USD 10–15 untuk mendukung kebutuhan hidup sambil mengikuti kelas. Program ini secara langsung bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan menghasilkan pendapatan dan memperluas jaringan sosial mereka (Women For Women International 2018).

Peran politik di sini bukan berarti kegiatan partai politik, tetapi mencakup upaya NGO untuk mempengaruhi kebijakan publik, memperluas ruang partisipasi perempuan, serta mendorong representasi suara kelompok rentan di level pengambilan keputusan. WFWI menjalankan *political roles* melalui advokasi global seperti laporan “*No One Hears Our Voices*” (2022) dan “*Lost in Consultation*” (2024) yang berisi rekomendasi perempuan Afghanistan untuk PBB dan negara donor. Mereka juga memfasilitasi dialog tertutup antara perempuan Afghanistan dan perwakilan PBB pada September 2022, bekerja sama dengan WILPF dan delegasi Norwegia. Dalam forum ini, peserta menyampaikan langsung tuntutan seperti pemulihan hak pendidikan, akses kerja, dan partisipasi perempuan dalam proses Doha (Women for Women International 2024).

3.1. Peran *Relief* Oleh *Women For Women International* Pada Isu Gender Di Afghanistan

Dalam literatur hubungan internasional, LSM atau NGO tradisional sering dikaitkan dengan peran bantuan kemanusiaan khususnya dalam bentuk bantuan darurat pada situasi krisis. Sepanjang abad ke-20, NGO dikenal terutama melalui

kegiatan amal dan respons bencana. Kegiatan tersebut mencakup penyaluran makanan, obat-obatan, serta layanan darurat bagi korban konflik dan bencana. Dengan demikian, citra NGO pada periode tersebut lebih banyak berfokus pada fungsi kemanusiaan dibandingkan peran politik atau advokatif yang berkembang pada era berikutnya (Ahmed and M. Potter 2006, 114).

Sebagai organisasi internasional yang fokus pada penyintas perempuan di zona perang, *Women for Women International* (WFWI) di Afghanistan turut menjalankan peran *relief* disana pasca 2021. Meskipun WFWI dikenal dengan program pemberdayaan jangka panjang, pada masa krisis organisasi ini mengintegrasikan bantuan kemanusiaan darurat bagi perempuan. Tim WFWI di Afghanistan yang dipimpin secara lokal tetap berupaya memberikan bantuan langsung di area-area yang mendapat izin meskipun akses terhadap perempuan dibatasi (Women for Women International 2023a).

Women for Women International di Afghanistan memberikan bantuan makanan pokok, perlengkapan sehari-hari, air bersih, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya, lalu juga membuat program rehabilitasi dan pemberdayaan perempuan yang terkena dampak dari adanya konflik disana. Konflik yang dialami oleh para perempuan di Afghanistan tersebut memberikan dampak yang sangat fatal seperti, banyaknya perempuan yang kehilangan keluarga mereka, rumah, hingga pekerjaan mereka yang menyebabkan para perempuan tersebut sering mendapatkan kekerasan, diskriminasi serta kemiskinan (UN Women and UNHCR 2023). Meskipun bantuan-bantuan tersebut bersifat sementara, pendekatan ini menjadi tahap awal untuk memantapkan kondisi pada masyarakat sebelum akhirnya lanjut ke program berkelanjutan, inisiatif ini menunjukkan respons cepat WFWI dalam

peran *relief*, menjangkau korban bencana alam di samping krisis akibat konflik (Women for Women International, n.d.).

WFWI memberikan bantuan-bantuan tersebut sebagai strategi awal mereka untuk mendukung para perempuan di Afghanistan. Hal tersebut sejalan dengan teori Shamima Ahmed dan David M. Potter yang menjelaskan bahwa *relief* harus selaras dengan upaya Pembangunan jangka panjang yang dijalankan oleh NGO (Ahmed and Potter 2006, 40-41). WFWI menerapkan pendekatan ini dengan memperhatikan dimensi sosial dan juga kultural dalam kehidupan masyarakat Afghanistan. Dari adanya kerja sama yang dilakukan oleh WFWI dengan organisasi disana serta keterlibatan tokoh perempuan, proses bantuan dilakukan dengan sensitif terhadap norma budaya sekitar. Hal tersebut memperkuat pandangan Ahmed dan Potter bahwa pendekatan ini berbasis partisipatif serta tidak menimbulkan suatu ketergantungan dari aktor luar.

Bantuan yang dilakukan oleh *Women for Women International* ini bukan hanya berakhir pada pengadaan kebutuhan pokok untuk korban konflik, tetapi juga menerapkan pendekatan yang sejalan dengan perkembangan pendekatan organisasi internasional seperti yang telah dijelaskan oleh Shamima Ahmed dan David M Potter. Di mana, dijelaskan bahwa bantuan kemanusiaan serta amal tentu saja menjadi sebuah landasan dari kegiatan sebuah organisasi sejak awal tercipta, terutama dalam menyikapi sebuah bencana serta krisis kemanusiaan. Akan tetapi, dijelaskan juga bahwa pendekatan ini sudah mengalami perkembangan, yang mana *relief* bukan lagi dilihat sebagai sebuah solusi jangka pendek saja, namun harus menyatu dengan upaya pembangunan jangka panjang atau berkelanjutan (Ahmed and Potter 2006, 40-41).

Dari teori yang dituliskan oleh Ahmed dan Potter, WFWI memahami bahwa bentuk bantuan seperti makanan, air bersih, serta tempat tinggal hanya langkah awal yang bertujuan untuk memantapkan kondisi kondisi perempuan yang terkena dampak konflik. Lalu, melanjutkan perannya dengan program rehabilitasi psikososial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi sosial yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketahanan serta kemandirian perempuan di Afghanistan (Women for Women International, n.d.-e). Dalam melaksanakan segala aktivitasnya, WFWI mengutamakan prinsip partisipatif dan juga kepekaan lintas budaya yang melibatkan sosok perempuan lokal. Hal tersebut menguatkan kesuksesan program sekaligus mengonfirmasi bahwa bantuan yang diberi oleh mereka sesuai dengan nilai dan juga norma masyarakat di Afghanistan. Dengan demikian, WFWI telah melaksanakan fungsi *relief* sebagaimana yang dimaksud oleh Ahmed dan Potter yaitu menjembatani antara bantuan kemanusiaan jangka pendek dengan pembangunan berkelanjutan yang memperkuat kemandirian perempuan Afghanistan.

3.2. Peran *Social and Economics* oleh *Women for Women International* di Afghanistan

Organisasi-organisasi amal menyadari bahwa pekerjaan bantuan yang dilakukan oleh mereka memiliki kecenderungan untuk hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek atau dengan kata lain tidak dapat menangani isu untuk jangka panjang. Maka dari itu, sekarang banyak organisasi yang membuat program yang dapat berguna untuk jangka panjang bagi mereka yang diberikan bantuan. Selain itu beberapa dari organisasi seperti *Women for Women International* meningkatkan dukungannya terhadap para korban yang mereka bantu dalam pembangunan

ekonomi dan sosial di negara-negara yang terkena masalah (Ahmed and Potter 2006, 40-41).

Women for Women International tentunya mengembangkan program mereka dalam bidang sosial dan ekonomi yang terancang untuk memberdayakan para perempuan di Afghanistan sejak tahun 2002 yaitu *Stronger Women, Stronger Nations*, ketika mereka pertama kali memulai pendampingan perempuan pasca-jatuhnya rezim Taliban. Program tersebut dirancang secara khusus untuk menjangkau perempuan dengan tingkat literasi rendah melalui metode pembelajaran yang sederhana dan partisipatif yang mana materinya meliputi pelatihan dasar tentang nilai kerja perempuan, pengelolaan tabungan, cara memperoleh penghasilan, hingga pengetahuan mengenai hak-hak perempuan (Women for Women International 2022). WFWI juga mendukung para perempuan Afghanistan dengan berupa uang bulanan, akses ke tabungan, hingga ke layanan kesehatan, hukum, serta keuangan yang dimana hal tersebut dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan, tabungan, dan juga kecukupan pangan keluarga para peserta yang mengikuti program (Women for Women International 2019).

Salah satu program utama *Women for Women International* (WFWI) di Afghanistan adalah *Stronger Women, Stronger Nations* (SWSN). Program ini dirancang untuk memberdayakan perempuan di negara-negara terdampak konflik melalui kombinasi pelatihan sosial, keterampilan ekonomi, serta dukungan finansial (Women for Women International 2021b). Sejak tahun 2021, dalam kerangka program ini, WFWI memberikan *monthly conditional cash transfer* sebesar US\$10 kepada setiap peserta selama 12 bulan penuh, bersamaan dengan kurikulum pelatihan yang mereka ikuti. Bantuan finansial ini tidak hanya

dimaksudkan untuk menutupi kebutuhan dasar rumah tangga seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan anak, tetapi juga berfungsi sebagai modal awal usaha kecil sehingga perempuan dapat mempraktikkan keterampilan ekonomi yang mereka pelajari. Dengan demikian, program SWSN menegaskan peran ganda WFWI yaitu guna memperkuat kapasitas sosial perempuan melalui kesadaran hak dan solidaritas, sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi mereka melalui keterampilan kerja dan kemandirian finansial (Women for Women International 2023).

Pendekatan ini membina kemandirian ekonomi secara bertahap. Data WFWI menunjukkan bahwa selama kurikulum berlangsung, peserta mampu meningkatkan pendapatan dan tabungan pribadi. Meski angka spesifik pendapatan sulit diukur dalam situasi ekonomi Afghanistan yang fluktuatif, indikator pemberdayaan menunjukkan hasil positif yang positif sebagai contoh partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga meningkat dua kali lipat dari yang sebelumnya hanya 32% yang terlibat pada awal program menjadi 65% yang terlibat saat lulus (Women for Women International 2023).

WFWI memiliki tujuan utama untuk para perempuan yang terkena dampak konflik disana, yaitu, perempuan memperoleh uang dan menabung uang, perempuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya, perempuan mempengaruhi keputusan di rumah dan komunitasnya, perempuan terhubung ke jaringan untuk mendapatkan sebuah dukungan. Dari pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sebuah aspek sosial dan juga ekonomi yang dilakukan oleh WFWI saling berhubungan dan menghasilkan sesuatu yang baik (Gibbs et al. 2018).

WFWI menjadi salah satu dari beberapa organisasi internasional yang dapat memberikan pelayanan langsung kepada para perempuan di Afghanistan disaat organisasi kemanusiaan lain menghadapi masalah untuk mengakses perempuan Afghanistan karena adanya larangan dari Taliban untuk para perempuan yang bekerja di suatu organisasi internasional (OCHA 2023). WFWI berhasil mengarahkan situasi tersebut dengan pendekatan yang cukup sensitif terhadap norma politik dan juga budaya sekitar, dan dengan mengikutsertakan staf perempuan lokal yang menjadi pionir dari program mereka. Pendekatan ini membukakan jalan WFWI untuk tetap melakukan pelatihan serta program pemberdayaan untuk perempuan, lalu menciptakan ruang yang sangat aman untuk mereka belajar walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas itu (UN Women 2024).

Dengan demikian, *social and economic roles* yang dilakukan oleh WFWI di Afghanistan bukan hanya merupakan respon terhadap kebutuhan mendesak tetapi juga bagian dari rencana pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan untuk memajukan perempuan dalam aspek ekonomi, sosial dan hak-hak sebagai warga negara. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa bantuan dan pembangunan dapat berjalan beriringan untuk menciptakan perubahan yang berdampak luas. Hal ini menunjukkan bahwa WFWI telah menjalankan peran sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Ahmed dan Potter yaitu mendorong transformasi sosial-ekonomi melalui pembangunan partisipatif yang berorientasi pada kemandirian dan kesetaraan gender (UN Women 2025).

3.3. Peran *Political Roles* oleh *Women for Women International* di Afghanistan

Bantuan yang diberikan oleh organisasi seringkali dianggap sebagai pekerjaan non-politik oleh pemerintah dan masyarakat, di mana kebanyakan organisasi memandang pekerjaannya sebagai sebuah hal yang bersifat teknis dan tidak berkaitan dengan politik maupun ekonomi. Seiring berjalannya waktu, organisasi modern mulai mengartikan tujuan pembangunannya dalam istilah politik yang menampilkan kesadaran mengenai peran politiknya (Ahmed and Potter 2006, 42-43).

Dalam peran *political roles* ini, organisasi memiliki peran sebagai aktor advokasi, penetapan agenda, fasilitator partisipasi masyarakat, serta pengawasan akuntabilitas. Peran-peran tersebut bukan hanya sebuah kegiatan kemanusiaan ataupun sosial-ekonomi, tetapi juga mencakup seluruh tindakan politis yang menentang dominasi negara dan menggerakkan reformasi kebijakan nasional hingga internasional. Hal ini terlihat jelas dalam aktivitas yang dijalankan oleh WFWI di Afghanistan “*Stronger Women, Stronger Nations*”. Program tersebut meliputi pelatihan mengenai hak-hak hukum, pengetahuan politik, kepemimpinan, serta dukungan kelompok yang memiliki tujuan untuk memperkuat posisi para perempuan para ruang terbuka. Selain itu, sejak tahun 2021 WFWI juga telah meluncurkan program bernama “*Afghanistan Crisis Response*” sebagai bentuk intervensi darurat untuk mendukung perempuan di tengah krisis politik dan sosial pasca-pemerintahan Taliban dengan demikian, kedua program ini saling melengkapi. SWSN yang berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang sementara *Afghanistan Crisis Response* berfokus kepada penyelamatan kebutuhan mendesak perempuan.

3.3.1 *Advocacy and lobbying*

Dalam buku yang ditulis oleh Shamima Ahmed dan David M.Potter, *Advocacy and Lobbying* dapat dipahami sebagai peran penting dari Organisasi Internasional Non-pemerintah di lingkup internasional. Organisasi non-pemerintah menggunakan pendekatan ini dengan tujuan mempengaruhi kebijakan politik, mendorong agenda politik yang mendukung Hak Asasi Manusia, lingkungan, dan juga keadilan sosial. *Advocacy* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh *NGO* untuk memperjuangkan suatu isu, prinsip, ataupun suatu kebijakan. Hal tersebut dapat menyangkut kampanye publik hingga peningkatan kesadaran pada masyarakat. Lalu, *lobbying* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh *NGO* yang bertujuan untuk dapat mempengaruhi keputusan lembaga pemerintah. Kedua hal ini digunakan oleh beberapa *NGO* untuk mencapai tujuan mereka (Ahmed and Potter 2006, 44-45).

Dijelaskan bahwa organisasi internasional seperti WFWI memanfaatkan *advocacy and lobbying* secara baik untuk memastikan suara aspirasi khususnya para perempuan yang menjadi korban konflik didengar pada pertemuan-pertemuan pengambilan keputusan tingkat tinggi. WFWI menggunakan data serta bukti yang mereka dapat dari program yang mereka lakukan untuk mengonfirmasi kebijakan serta praktik pada tingkat global. Mereka melakukan sebuah penelitian yang dalam, menata penyampaian para perempuan untuk berbicara secara langsung dengan perwakilan PBB, dan meluncurkan laporan-laporan kebijakan yang menekankan kebutuhan serta harapan perempuan. Pendekatan tersebut menjelaskan bahwa *advocacy and lobbying* bukan hanya sebuah alat yang bertujuan untuk mempengaruhi sebuah kebijakan, namun juga menjadi sarana pengembangan untuk

para kelompok yang sejauh ini terabaikan. *Advocacy and Lobbying* bukan hanya sekedar aktivitas politik, tetapi juga merupakan sebuah bagian dari cara untuk meningkatkan keterlibatan demokratis serta keadilan sosial internasional (Women for Women International 2022).

Women for Women International menerapkan peran *advocacy* di Afghanistan dengan serius. Dalam laporannya pada tahun 2021, WFWI melakukan penilaian situasional yang mereka lakukan untuk memahami bagaimana cara untuk memulai kembali program-program mereka dengan cara yang aman untuk para perempuan Afghanistan yang ikut serta melalui laporan tersebut, WFWI berusaha mengangkat suara perempuan mengenai hilangnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya. Riset yang mereka lakukan sejak Desember 2021 membantu WFWI untuk mendengar secara langsung mengenai bagaimana cerita mereka sepanjang tahun ini seperti kebutuhan sehari-hari, prioritas mereka, hingga harapan masa depan yang masih dimiliki oleh mereka, sehingga WFWI merangkum cerita mereka menjadi sebuah agenda kebijakan yang akan menjadi informasi advokasi global WFWI (UNAMA 2023).

Temuan-temuan dari riset tersebut tidak berhenti pada tataran konseptual tetapi menjadi dasar bagi WFWI untuk mengembangkan strategi advokasi yang lebih terarah dan berbasis bukti di forum internasional salah satunya ialah upaya menciptakan ruang dialog langsung antara perempuan Afghanistan dan perwakilan PBB. WFWI bersama *Women's International League for Peace and Freedom* (WILPF) dan perwakilan Norwegia di PBB menyelenggarakan diskusi tertutup yang menghadirkan aktivis hak perempuan Afghanistan dengan pejabat tinggi PBB dan negara anggota pada September 2022, dalam forum tersebut para perempuan

Afghanistan dapat menyampaikan prioritas dan rekomendasi mereka secara langsung kepada para pemimpin dunia menjelang Sidang Umum PBB (Women's International League for Peace and Freedom 2022).

Upaya advokasi semacam itu memastikan isu yang disuarakan perempuan masuk agenda global. Setelah dialog tadi, WFWI mempublikasikan poin-poin tuntutan kunci dari perempuan Afghanistan melalui siaran pers dan laporan kebijakan. Topik yang diangkat antara lain seruan agar Dewan Keamanan PBB tetap fokus pada hak perempuan serta desakan agar respons internasional tidak semata berupa bantuan kemanusiaan jangka pendek. Perempuan Afghanistan yang difasilitasi WFWI meminta komunitas internasional mendukung solusi berkelanjutan salah satunya pendanaan fleksibel untuk organisasi perempuan lokal dan pemulihan ekonomi yang membuka lapangan kerja bagi perempuan (Human Rights Watch 2024). WFWI juga merilis laporan kebijakan seperti *"No One Hears Our Voices"* (2022) dan *"Lost in Consultation"* (2024), laporan-laporan ini menyoroti kebutuhan dan harapan perempuan Afghanistan, sekaligus mengkritik minimnya keterlibatan perempuan dalam pertemuan internasional tentang masa depan Afghanistan. Melalui advokasi berbasis bukti dan pelibatan langsung tersebut, WFWI bukan hanya mempengaruhi kebijakan tetapi juga memberdayakan perempuan Afghanistan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka sebagai suatu bentuk partisipasi demokratis dan penegakan keadilan sosial di ranah internasional (Women for Women International 2024).

Dalam menjalankan fungsi *lobbying* WFWI menempuh rangkaian proses yang sistematis dan bertahap sebelum mencapai hasil di tingkat internasional.

Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan bukti lapangan dari staf lokal dan peserta program untuk mendokumentasikan bentuk-bentuk pelanggaran dan pembatasan hak perempuan Afghanistan. Data yang terkumpul kemudian diolah menjadi laporan situasional dan *policy brief* yang menjadi dasar legitimasi advokasi. Tahap kedua adalah koordinasi dengan jaringan organisasi internasional untuk menyelaraskan rekomendasi kebijakan dan memperkuat posisi advokasi kolektif. Tahap ketiga berupa *lobbying* formal melalui pertemuan dengan aktor internasional seperti UN Women, negara donor dan UNAMA untuk memasukkan isu hak perempuan Afghanistan ke dalam agenda kebijakan global. Tahap keempat dilakukan melalui kampanye multilateral di forum resmi PBB guna mendorong tekanan diplomatik kolektif terhadap Taliban. Dengan demikian, *lobbying* WFWI merupakan proses yang dimulai dari pengumpulan bukti, penyusunan rekomendasi, pembentukan koalisi, hingga intervensi diplomatik di tingkat global.

Setelah itu, WFWI menjalankan fungsi *lobbying* yang ditujukan kepada aktor-aktor berpengaruh di level internasional guna menekan Taliban agar menghormati hak perempuan. Berdasarkan temuan lapangan dan suara perempuan yang dihimpun WFWI mendesak negara-negara donor dan PBB mengambil sikap tegas terhadap rezim Taliban. WFWI turut menandatangani surat terbuka koalisi NGO kepada Dewan Keamanan PBB yang mendesak dunia internasional tidak memberikan legitimasi diplomatik kepada Taliban sebelum hak-hak perempuan dipulihkan. Surat pada pertengahan 2024 itu menegaskan agar negara anggota PBB menolak memberikan kursi PBB kepada Taliban, tidak mengundang mereka dalam pertemuan resmi serta menunda pembukaan kembali hubungan diplomatik semua ini demi mencegah normalisasi rezim yang terus melanggar hak perempuan

(Women Peace Security 2024). Sikap tersebut sejalan dengan peringatan kelompok HAM internasional bahwa setiap kali Taliban disambut di forum global tanpa prasyarat hal itu mengirim pesan bahwa hak perempuan Afghanistan dianggap tidak penting oleh dunia (Dickie and Greenfield 2023).

WFWI juga melobi melalui jalur PBB agar isu gender menjadi agenda utama dalam mandat dan kebijakan internasional terhadap Afghanistan. Mereka mendorong misi PBB di Afghanistan (UNAMA) untuk secara eksplisit memprioritaskan hak perempuan dalam mandatnya. Hal ini disuarakan setelah sempat terjadi pembaruan mandat UNAMA yang menghapus referensi kepada perempuan dan anak perempuan akibat tekanan politik pada 2021, WFWI menilai mandat PBB harus kembali menegaskan perlindungan hak perempuan sebagai inti strateginya dan dilengkapi mekanisme pemantauan independen (Women for Women International 2022d). Melalui *lobby* semacam ini WFWI mengarahkan tekanan internasional pada pihak-pihak kunci Mereka bekerja sama dengan jaringan organisasi perempuan global untuk mendorong PBB dan pemerintah donor menetapkan prinsip bahwa hak perempuan Afghanistan tidak dapat dinegosiasikan dalam proses apapun dengan Taliban. Konsistensi *lobby* tersebut bertujuan memastikan komunitas internasional memakai pengaruh dan leverage-nya untuk menekan Taliban, sembari menyampaikan bahwa pemenuhan hak-hak dasar perempuan adalah prasyarat bagi pengakuan dan bantuan jangka panjang. Dengan demikian advokasi yang melahirkan suara perempuan menjadi landasan bagi strategi *lobbying* WFWI, dimana tekanan diplomatik difokuskan kepada aktor-aktor global agar sejalan memperjuangkan hak perempuan Afghanistan (Women Peace Security 2024).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas advokasi dan lobi yang dijalankan oleh *Women for Women International* telah mewujudkan peran NGO sebagaimana dijelaskan oleh Ahmed dan Potter, yakni sebagai aktor non-pemerintah yang berfungsi mempengaruhi kebijakan dan agenda politik internasional. Melalui riset berbasis bukti, kampanye global, serta pelibatan langsung perempuan Afghanistan dalam forum internasional, WFWI bukan hanya menjadi jembatan suara perempuan yang terpinggirkan, tetapi juga agen diplomasi kemanusiaan yang menegaskan prinsip keadilan gender dalam pengambilan keputusan global (UN Women 2024).

3.3.2 Public Education and Consciousness Raising

Kegiatan advokasi publik dapat terlihat misalnya dari demonstrasi damai oleh kaum perempuan Afghanistan yang menuntut penghormatan hak-hak mereka di depan gedung pemerintahan. Demonstrasi semacam ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa krusialnya isu kesetaraan gender. Secara konseptual, NGO berperan penting dalam mengedukasi publik dengan mengkampanyekan isu-isu sosial dan membangun tekanan publik terhadap kebijakan pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan dalam studi NGO di Indonesia, melalui kegiatan seperti kampanye dan penyuluhan, NGO “tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang relevan, tetapi juga berusaha untuk menemukan solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat” (Wardani 2024). Dalam konteks WFWI, isu-isu yang disampaikan publik mencakup pembatasan hak pendidikan dan pekerjaan perempuan. WFWI ikut menyebarkan kesadaran ini ke khalayak internasional dengan cara melaporkan

kondisi sebenarnya yang dialami perempuan Afghanistan, sehingga isu tersebut menjadi perhatian global.

Untuk mewujudkan pendidikan publik, WFWI mengumpulkan pengalaman langsung perempuan Afghanistan dan menyusunnya sebagai bahan advokasi. Misalnya, laporan *Lost in Consultation* WFWI memperlihatkan keprihatinan 213 organisasi perempuan Afghanistan mengenai pengucilan mereka dalam pertemuan-pertemuan PBB bersama Taliban. Laporan tersebut menyoroti bahwa masyarakat internasional belum bersedia menekan Taliban mengenai hak-hak perempuan dan kurang melibatkan suara perempuan Afghanistan dalam proses keputusan (Women for Women International, n.d.-c). Temuan seperti ini dipublikasikan agar dunia internasional menyadari urgensi memperhatikan hak-hak perempuan. Melalui pemberitaan hasil wawancara dan survei, WFWI mendidik publik global tentang realitas kehilangan akses pendidikan, kerja, dan partisipasi sosial bagi perempuan di bawah rezim Taliban. Dengan demikian kampanye informasi WFWI bertujuan membentuk opini global agar kebijakan bantuan dan hubungan diplomatik dipertimbangkan dengan mempertimbangkan perlakuan Taliban terhadap perempuan.

Selain itu, WFWI secara terbuka mengimbau komunitas internasional untuk mengambil tindakan langsung. Organisasi ini menyerukan agar negara-negara donor meningkatkan bantuan kemanusiaan dan mencabut sanksi ekonomi demi mencegah krisis kelaparan yang melanda Afganistan, dengan tetap menekankan pentingnya pemenuhan hak perempuan dalam proses pemulihan nasional. Salah satu contohnya WFWI melaporkan bahwa jutaan warga Afghanistan menghadapi risiko kelaparan di musim dingin, sehingga perlu ada stimulus ekonomi. Seruan ini

juga disertai argumen bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan sangat penting, karena pengalaman dua dekade terakhir membuktikan perempuan adalah agen perubahan yang mampu memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi Masyarakat (Women for Women International, n.d.-e). Melalui penyebaran informasi tersebut, WFWI mendidik masyarakat luas untuk melihat perempuan sebagai kunci pemulihan.

Dalam hal ini dapat kita lihat bahwasanya badan-badan internasional seperti UNESCO bahkan mencatat bahwa Afganistan saat ini secara tragis menjadi satu-satunya negara di dunia di mana pendidikan menengah dan tinggi dilarang bagi perempuan. Sekitar 2,2 juta perempuan secara resmi dilarang mengakses sekolah menengah ke atas dan perguruan tinggi akibat kebijakan Taliban (UNESCO, n.d.). Fakta ini menegaskan betapa gentingnya situasi pendidikan perempuan, dan oleh karena itu WFWI berupaya menyosialisasikan kondisi ini kepada publik internasional. Dengan mengutip data UNESCO tersebut, WFWI menekankan bahwa larangan pendidikan hanya memperparah penurunan angka pendaftaran sekolah dan menciptakan generasi yang putus asa. Penyebaran informasi semacam ini melalui laporan dan pernyataan resmi merupakan bagian dari strategi peningkatan kesadaran publik yang dikembangkan oleh WFWI.

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwasanya pendekatan *public education and consciousness raising* oleh WFWI dilakukan dengan mengangkat suara perempuan Afghanistan ke arena global. Lewat media, laporan, dan kampanye solidaritas, WFWI mengintervensi wacana publik internasional agar isu hak perempuan Afghanistan tidak diabaikan. Dengan demikian, WFWI berkontribusi pada perubahan persepsi dan peningkatan dukungan publik terhadap

program-program kemanusiaan yang sensitif gender, sesuai prinsip bahwa edukasi publik dapat memperkuat dukungan terhadap kebijakan dan advokasi hak asasi manusia (Wardani 2024).

Target audiens dari upaya *public education and consciousness raising* WFWI mencakup dua kelompok utama. Pertama, pemerintah dan komunitas internasional sebagai pembuat kebijakan, karena WFWI ingin memengaruhi arah diplomasi dan bantuan agar mempertimbangkan hak-hak perempuan Afghanistan. Kedua, publik internasional serta perempuan Afghanistan sendiri, karena WFWI berupaya membangun kesadaran global dan solidaritas publik terhadap kondisi yang dihadapi perempuan di bawah rezim Taliban. Dengan demikian, kampanye mereka tidak hanya menyasar masyarakat perempuan, tetapi juga menargetkan pemerintah sebagai aktor kunci dalam perubahan kebijakan. Dengan demikian, pendekatan *public education and consciousness raising* yang dijalankan oleh WFWI merepresentasikan fungsi strategis NGO sebagaimana dijelaskan oleh Ahmed dan Potter. Melalui upaya peningkatan kesadaran publik lintas negara, WFWI menunjukkan bagaimana sebuah organisasi non-pemerintah dapat berperan sebagai penghubung antara pengalaman lokal dan perhatian global, memperkuat solidaritas internasional serta memperluas ruang advokasi bagi hak-hak perempuan Afghanistan.

3.3.3 Agenda Setting

Agenda Setting sendiri merupakan sebuah proses *NGO* mempengaruhi isu yang diperhatikan oleh pembuat kebijakan, media, dan masyarakat dunia. Agenda Setting sendiri dilakukan oleh Organisasi Internasional dengan tujuan menempatkan suatu isu atau masalah pada agenda kebijakan pemerintah serta

Organisasi Internasional, mengarahkan pusat perhatian masyarakat kepada masalah yang penting, serta mempengaruhi bagaimana sebuah isu dapat dipahami oleh masyarakat dan juga pemerintah (Ahmed and Potter 2006, 65-66).

Dalam buku yang ditulis oleh Shamima Ahmed dan David M.Potter dijelaskan bahwa fungsi *Agenda Setting* sangat relevan dengan apa yang telah dilakukan oleh *Women for Women International*. Dari yang telah dilakukan oleh WFWI yaitu menyesuaikan permasalahan lokal dengan nilai internasional. Isu mengenai perempuan di Afghanistan bukan hanya ditampilkan sebagai sebuah akibat dari adanya pemikiran ekstrim, tetapi juga semacam sebuah cerminan dari kegagalan komunitas internasional dalam perlindungan nilai kesetaraan dan juga keadilan. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Shamima Ahmed dan David M.Potter yang mengatakan bahwa *Agenda Setting* yang produktif perlu penafsiran isu dengan cara yang demikian agar keteguhan moral bisa tercapai serta mendorong tindakan kolektif global (Ahmed and Potter 2006, 66).

Dalam menjalankan agenda setting WFWI menempuh proses yang dimulai dengan mengidentifikasi isu utama yang dialami perempuan Afghanistan, terutama hilangnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik sejak Taliban berkuasa. Isu-isu tersebut kemudian diframing agar dipahami sebagai ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan stabilitas kawasan, sehingga dianggap sebagai masalah global, bukan isu domestik semata. WFWI lalu menghimpun data lapangan, kesaksian perempuan dan temuan riset untuk memperkuat argumentasi normatif dan empiris. Tahap berikutnya adalah komunikasi strategis melalui publikasi laporan dan kampanye media internasional yang bertujuan menarik perhatian pembuat kebijakan. WFWI juga membangun koalisi dengan organisasi

perempuan internasional untuk memperluas dukungan. Setelah itu, WFWI memanfaatkan momentum diplomatik seperti Sidang Umum PBB dan pertemuan negara donor untuk memastikan isu perempuan Afghanistan masuk dalam agenda resmi kebijakan internasional. Dengan demikian, agenda setting WFWI merupakan proses berlapis mulai dari identifikasi isu, framing, pengumpulan bukti, komunikasi strategis, pembentukan koalisi, hingga pemanfaatan momentum global.

Women for Women International (WFWI) secara aktif mengadvokasi agar komunitas internasional tidak melupakan tuntutan perempuan Afghanistan dalam penentuan prioritas kebijakan. Laporan dan pernyataan pers *Lost in Consultation* menyatakan bahwa meski pertemuan khusus duta besar PBB dengan Taliban akan membahas isu ekonomi dan narkoba, hak-hak perempuan tampak diabaikan dalam agenda tersebut. Temuan laporan mengungkap bahwa 86% responden organisasi perempuan menghendaki mereka dikonsultasikan sebelum pertemuan Doha 2024, dan sebagian besar menilai pertemuan tanpa partisipasi perempuan tidak berguna. Tindakan WFWI menyebarkan temuan ini ke media internasional menekankan agenda bahwa hak perempuan Afghanistan harus sejajar dengan isu-isu keamanan dan ekonomi. Seperti yang dikatakan seorang responden dalam laporan tersebut, “Saat ada kekhawatiran keamanan tentang Afghanistan semua sumber daya dikerahkan, tetapi mengapa hak asasi, terutama hak perempuan, tidak mendapat perlakuan yang sama?”. Petinggi WFWI menegaskan bahwa tanpa masukan perempuan, kebijakan internasional akan kehilangan cakupan penting terhadap masa depan Afghanistan dan stabilitas kawasan (Women for Women International,

n.d.-c). Dengan cara ini, WFWI berusaha mengubah prioritas pertemuan internasional agar lebih inklusif.

Para ahli pun turut memperingatkan negara-negara bahwa keterlibatan diplomatik dan bantuan kemanusiaan kepada rezim Taliban harus dipertimbangkan dengan ketat. Organisasi-organisasi seperti *Atlantic Council* menyarankan agar pengakuan diplomatik, bantuan, dan bentuk kerja sama lain dikondisikan pada perbaikan nyata dalam hak asasi manusia dan akuntabilitas (Abrar 2024). Gagasan ini sesuai dengan upaya WFWI menekankan dalam komunikasinya bahwa negara donor tidak boleh kembali berhubungan normal tanpa Taliban memenuhi standar hak perempuan. Dengan mengutip panduan seperti itu, WFWI menambah tekanan agar isu hak perempuan menjadi syarat utama dalam kebijakan luar negeri dan bantuan internasional. Pendekatan ini sebenarnya berakar pada kepentingan global: secara historis, banyak negara menyatakan tidak akan mengakui pemerintahan Taliban bila hak perempuan diabaikan. Peringatan semacam ini menunjukkan bagaimana masyarakat internasional menempatkan tuntutan hak perempuan ke dalam agenda diplomatik. WFWI memanfaatkan momentum tersebut dalam lobi dan kampanye, mendorong agar konsensus internasional mencantumkan persyaratan pemenuhan hak perempuan sebagai prasyarat engagement dengan rezim Taliban (Mutiasari 2021).

Dengan demikian WFWI menggunakan agenda setting untuk mempengaruhi prioritas lembaga internasional. Melalui laporan, siaran pers, dan kemitraan dengan organisasi lain, WFWI memasukkan isu hak perempuan Afghanistan ke dalam diskusi PBB dan forum internasional. Kombinasi pengumpulan data dari lapangan dan advokasi diplomatik ini membantu

memastikan bahwa hak-hak perempuan tidak dihapus dari agenda kebijakan dan pembangunan internasional, melainkan menjadi fokus utama dalam negosiasi dan kebijakan bantuan (Abrar 2024).

Melalui peran ini WFWI menunjukkan bagaimana organisasi non-pemerintah dapat memanfaatkan strategi *agenda setting* untuk memperluas pengaruhnya dalam sistem politik internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmed dan Potter, kemampuan NGO untuk mengarahkan fokus dan prioritas kebijakan global menandakan pergeseran peran dari sekadar pelaksana bantuan menjadi aktor yang aktif membentuk arah diskursus pembangunan. Dengan demikian, WFWI telah merealisasikan fungsi strategis NGO sebagai jembatan antara pengalaman perempuan di tingkat lokal dan pembentukan kebijakan global yang lebih berperspektif gender dan berkeadilan sosial.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran *Women for Women International (WFWI)* dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di Afghanistan pasca pengambilalihan Taliban tahun 2021–2024 diwujudkan melalui tiga bentuk utama yaitu *advocacy*, *lobbying* dan *agenda setting*.

Menurut Ahmed dan Potter peran *relief* dalam organisasi non-pemerintah mencakup kegiatan amal dan bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan manusia di masa krisis. Mereka menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak boleh berhenti pada upaya jangka pendek, melainkan harus diintegrasikan dengan strategi pembangunan berkelanjutan agar tidak menimbulkan ketergantungan.

Peran *relief* dijalankan melalui pemberian bantuan kemanusiaan berupa dukungan dasar seperti pangan, kebutuhan pokok, serta bantuan psikososial bagi perempuan terdampak konflik di Afghanistan. WFWI juga menyediakan tempat tinggal sementara serta program pemulihan trauma bagi perempuan korban kekerasan dan kehilangan akibat konflik berkepanjangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa WFWI tidak hanya memberikan bantuan sesaat tetapi juga membangun fondasi bagi pemberdayaan jangka panjang yang memperkuat ketahanan serta kemandirian perempuan Afghanistan.

Dengan demikian WFWI telah melaksanakan fungsi *relief* sebagaimana yang dimaksud oleh Ahmed dan Potter yaitu menjembatani antara bantuan

kemanusiaan jangka pendek dengan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kemandirian penerima manfaat.

Menurut Ahmed dan Potter menjelaskan bahwa peran sosial dan ekonomi NGO berorientasi pada pembangunan jangka panjang melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuannya adalah agar penerima manfaat dapat mandiri secara sosial dan ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan luar. Sejalan dengan pandangan tersebut, WFWI melaksanakan peran sosial dan ekonomi melalui program *Stronger Women, Stronger Nations* yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan Afghanistan. Program ini mencakup pelatihan keterampilan kewirausahaan, bantuan tunai, serta pelatihan literasi keuangan agar perempuan mampu mengelola usaha kecil dan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Selain itu, WFWI juga menanamkan nilai solidaritas dan kesadaran akan hak-hak perempuan dalam konteks sosial, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan masyarakat.

Hal ini memperjelas bahwasanya WFWI telah menjalankan peran sosial dan ekonomi sebagaimana yang dimaksud oleh Ahmed dan Potter yaitu mendorong transformasi sosial-ekonomi melalui pembangunan partisipatif yang berorientasi pada kemandirian dan kesetaraan gender.

Dalam pandangan Ahmed dan Potter peran politik NGO mencakup aktivitas advokasi, pendidikan publik dan penetapan agenda global. Melalui tiga fungsi ini, NGO dapat memengaruhi pembuat kebijakan, membentuk opini publik, serta menempatkan isu-isu kemanusiaan dan kesetaraan gender di pusat perhatian internasional.

WFWI mengaktualisasikan peran politik ini melalui kegiatan advokasi dan diplomasi internasional untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Afghanistan. Melalui laporan, siaran pers, serta kemitraan dengan lembaga global seperti PBB dan organisasi non-pemerintah lain WFWI berhasil membawa isu kesetaraan gender ke dalam agenda kebijakan internasional. Kampanye global dan publikasi yang dilakukan oleh WFWI juga berhasil mengubah persepsi publik dunia terhadap perempuan Afghanistan dari sekadar korban konflik menjadi agen perubahan yang aktif.

Dengan demikian, WFWI telah mengimplementasikan peran politik sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmed dan Potter yakni sebagai aktor transnasional yang mampu mempengaruhi kebijakan, membangun kesadaran publik, serta menempatkan isu perempuan dalam prioritas agenda pembangunan internasional

Pada aspek politik WFWI berperan aktif dalam memperjuangkan hak perempuan di tingkat global. Melalui kegiatan advokasi, pelaporan kebijakan serta kerja sama dengan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WFWI berhasil membawa isu kesetaraan gender ke dalam agenda kebijakan internasional. Laporan seperti *Lost in Consultation* (2024) menunjukkan bahwa WFWI menjadi salah satu aktor utama dalam menekan komunitas internasional agar hak-hak perempuan menjadi prioritas dalam diplomasi dan pembangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran WFWI tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan kemanusiaan, tetapi juga meluas pada upaya transnasional yang memadukan pendekatan sosial, ekonomi dan politik untuk memperjuangkan keadilan gender serta hak asasi perempuan di Afghanistan.

Rangkuman keterkaitan antara teori Ahmed dan Potter dengan penerapannya oleh WFWI dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Indikator Teori Ahmed dan Potter (2006) dan Penerapan oleh WFWI di Afghanistan

Indikator dari Ahmed & Potter	Definisi	Peran WFWI
Relief	NGO berperan dalam kegiatan amal dan bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan manusia di masa krisis. Bantuan tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat, tetapi harus terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan agar tidak menciptakan ketergantungan.	WFWI memberikan bantuan kemanusiaan berupa pangan, air bersih, kebutuhan dasar, dan dukungan psikososial bagi perempuan terdampak konflik. Bantuan ini menjadi dasar bagi program jangka panjang seperti pelatihan keterampilan dan rehabilitasi sosial.
Politik	NGO berfungsi meningkatkan kapasitas masyarakat secara sosial dan ekonomi melalui pembangunan partisipatif jangka panjang. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian dan kesetaraan sosial-ekonomi.	WFWI melaksanakan program <i>Stronger Women, Stronger Nations</i> yang memberikan pelatihan kewirausahaan, bantuan tunai dan literasi keuangan untuk memperkuat kemandirian perempuan Afghanistan.
Ekonomi	NGO bertindak sebagai aktor politik transnasional yang melakukan advokasi, pendidikan publik dan penetapan agenda global untuk mempengaruhi kebijakan internasional dan meningkatkan kesadaran publik.	WFWI melakukan advokasi dan kerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB, menerbitkan laporan, serta mengangkat isu hak perempuan Afghanistan agar menjadi prioritas dalam kebijakan global.

Sumber: Diolah dari Shamima Ahmed dan David M Potter (2006)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa setiap peran yang dijelaskan oleh Ahmed dan Potter telah diimplementasikan secara konkret oleh WFWI dalam konteks Afghanistan. Peran *relief* dijalankan melalui bantuan kemanusiaan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, peran sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan serta peningkatan kapasitas perempuan, dan peran politik melalui advokasi serta kerja sama internasional. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa WFWI tidak hanya merepresentasikan konsep teoritis dari Ahmed dan Potter, tetapi juga mengaktualisasikannya dalam praktik nyata sebagai organisasi non-pemerintah yang berkontribusi terhadap keadilan sosial dan kesetaraan gender di tingkat global.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa model intervensi yang dilakukan WFWI dapat dijadikan contoh efektif bagi organisasi non-pemerintah lain yang beroperasi di wilayah konflik. Integrasi antara pendekatan kemanusiaan, pembangunan sosial-ekonomi dan advokasi kebijakan menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan perubahan berkelanjutan. WFWI tidak hanya merespons kebutuhan jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada rekonstruksi sosial dan penguatan kapasitas masyarakat sipil di tingkat akar rumput. Dari perspektif akademik, temuan ini memperkaya wacana mengenai peran NGO sebagai aktor transnasional yang mampu beradaptasi dengan dinamika politik global sekaligus mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, WFWI tidak hanya berhasil mewujudkan prinsip-prinsip teoritis Ahmed dan Potter, tetapi juga memperluas pemahaman tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil dapat menjadi katalis perubahan struktural dalam konteks pascakonflik dan pembangunan inklusif.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup yang berfokus pada periode 2021–2024 serta konteks Afghanistan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas kajian dengan membandingkan strategi dan efektivitas WFWI di negara-negara lain yang menghadapi kondisi pasca konflik, seperti Sudan atau Nigeria. Pendekatan komparatif tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai adaptasi dan dampak global strategi pemberdayaan perempuan oleh WFWI.

Selain itu penelitian lanjutan juga disarankan untuk menelusuri lebih dalam efektivitas sinergi antara strategi *advocacy*, *lobbying* dan *agenda setting* WFWI dalam mempengaruhi kebijakan lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Uni Eropa atau lembaga donor multilateral. Kajian terhadap kolaborasi antar organisasi perempuan seperti antara WFWI dan *UN Women* diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai model kerja sama yang efektif dalam memperjuangkan hak perempuan di wilayah konflik. Dengan demikian, penelitian-penelitian mendatang dapat memperkaya literatur hubungan internasional, khususnya mengenai peran organisasi non-pemerintah internasional dalam diplomasi kemanusiaan dan keadilan sosial global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Samira. 2024. "Don't Look Away: The Taliban's Mistreatment of Women Has Global Ramifications." *Atlantic Council*, April 30, 2024. <https://www.atlanticcouncil.org/content-series/inside-the-talibans-gender-apartheid/dont-look-away-the-talibans-mistreatment-of-women-has-global-ramifications/>.
- Ahmed, Shamima, and David M Potter. 2006. *Shamima Ahmed, David M. Potter - NGOs in International Politics-Kumarian Press (2006)*. Kumarian Press, Inc. pdfcoffee.com_ngos-in-international-politics-pdf-pdf-free.pdf.
- Amnesty International. 2022. "Death in Slow Motion: Women and Girls Under Taliban Rule." July 27, 2022. *Amnesty International*. <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2022/07/women-and-girls-under-taliban-rule-afghanistan/>
- Andani, Rafika Wahyu. 2022. "Segitiga Kekerasan, Ham, Dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban." *Jurnal Pena Wima* 2 (1): 1. <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i1.6165>.
- Aulia Putri, Octaviani. 2022. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Dan Anak (Protection Of Human Rights For Women And Children)*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18733.15846>.
- Azria, Kaiva, and Erma Ramayani. 2022. "Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini." *Jurnal PIR : Power in International Relations* 6 (February): 122. <https://doi.org/10.22303/pir.6.2.2022.122-137>.
- BBC. 2022. "Setahun Kekuasaan Taliban, Bagaimana Hak-Hak Perempuan Afghanistan Direnggut?" *Tempo*, August 13. <http://www.tempo.co/bbc/10250/setahun-kekuasaan-taliban-bagaimana-hak-hak-perempuan-afghanistan-direnggut>.
- Dickie, Gloria, and Charlotte Greenfield. 2023. "Afghanistan Excluded from COP28 as Climate Impacts Hit Home." *Reuters*, December 11, 2023. <https://www.reuters.com/world/afghanistan-excluded-cop28-climate-impacts-hit-home-2023-12-11/>
- Down To Earth. 2023. "Erased from Public Life: Afghan Women Face One of the World's Deepest Gender Crisis, Finds UN." December 4, 2023. Down To Earth.
- Ekanoviarini, Tsabitah, and Aji Wibowo. 2022. "Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi Cedaw." *Reformasi Hukum Trisakti* 4 (July): 715–28. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14097>.

- Gibbs, Andrew, Julianne Corboz, Mohammed Shafiq, Frozan Marofi, Anna Mecagni, Carron Mann, Fazal Karim, Esnat Chirwa, Charlotte Maxwell-Jones, and Rachel Jewkes. 2018. *An Individually Randomized Controlled Trial to Determine the Effectiveness of the Women for Women International Programme in Reducing Intimate Partner Violence and Strengthening Livelihoods amongst Women in Afghanistan: Trial Design, Methods and Baseline Findings*. 2018, 2. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5029-1>.
- Human Rights Watch. 2023. "Afghanistan: Taliban Ban Women Working for NGOs." January 5, 2023. <https://www.hrw.org/news/2023/01/05/afghanistan-taliban-ban-women-working-ngos>
- Human Rights Watch. 2024. "Letter to the UN, Security Council and Member States on Women's Rights in Afghanistan." June 10 2024. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2024/06/10/letter-un-security-council-and-member-states-womens-rights-afghanistan>
- Human Rights Watch. 2024. "World Report 2024: Afghanistan." Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/afghanistan>
- International Crisis Group. 2023. "Taliban Restrictions on Women's Rights Deepen Afghanistan's Crisis." February 2023. International Crisis Group. <https://icg-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/2023-02/329-afghanistan-womens-rights.pdf>
- Medica Mondiale. 2023. "Afghanistan." June. <https://medicamondiale.org/en/where-we-empower-women/afghanistan>.
- Mutiasari, Tia. 2021. "Menunggu Taliban memenuhi hak perempuan Afghanistan." Indonesia. *Antara News*, December 31, 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2618221/menunggu-taliban-memenuhi-hak-perempuan-afghanistan>.
- Najafizada, Eltaf. 2021. "A Taliban Ban on Women in the Workforce Can Cost Economy \$1bn." Al Jazeera, December 1. <https://www.aljazeera.com/economy/2021/12/1/talibans-ban-on-women-in-the-workforce-can-cost-economy-1bn>.
- OCHA. 2023. "Afghanistan: Ban on Female NGO Workers Severely Undermines Aid Delivery." United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
- RFE/RL. 2025. "Four Years On, UN Says Taliban Close To 'Erasing' Afghan Women From Public Life." Afghanistan. *Radio Free Europe/Radio Liberty*, August 14, 2025. <https://www.rferl.org/a/un-taliban-erasing-afghan-women-from-public-life/33501215.html>.

- Sandra, Chaker. 2025. "A Nation Without Women: The Taliban's Repression of Their Freedoms | Outlook." OUTLOOK, June 30. <https://sites.aub.edu.lb/outlook/2025/06/30/a-nation-without-women-the-talibans-repression-of-their-freedoms/>.
- Septiadi, Gilang Agung. 2019. "Strategi Women For Women International (Wfwi) Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Afghanistan." *Frequency of International Relations (FETRIAN)* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.25077/fetrian.1.1.122-157.2019>.
- UNAMA (*United Nations Assistance Mission in Afghanistan*). 2023. "Situation of Afghan Women – Summary Report of Country-wide Women's Consultations." November 2023. *United Nations*.
- UNAMA. 2023. "Statement on De Facto Authorities' Decision to Ban Afghan Women Working for the UN." May 5, 2023. <https://unama.unmissions.org/statement-un-afghanistan-de-facto-authorities%E2%80%99-decision-ban-afghan-women-working-for-the-un>
- UNESCO. 2024. "Afghanistan: 1.4 Million Girls Still Banned from School by de Facto Authorities | UNESCO." September 24. <https://www.unesco.org/en/articles/afghanistan-14-million-girls-still-banned-school-de-facto-authorities>.
- UNESCO. n.d. "Protecting the Right to Education for All Afghans." <https://www.unesco.org/en/emergencies/education/afghanistan>
- United Nations. 2024. "Afghanistan's De Facto Authorities' New Law Barring Women from Medical Training Imperils Entire Country's Health, Stability, Briefers Tell Security Council | Meetings Coverage and Press Releases." UNITED NATIONS, December 12. <https://press.un.org/en/2024/sc15932.doc.htm>.
- UN Women and UNHCR. 2023. "Afghan Women and Girls: Factsheet." *UN Women*.
- UN Women. 2022. "Afghanistan: Women's Rights Under Threat." <https://www.unwomen.org/en/articles/in-focus/afghanistan-womens-rights-under-threat>
- UN Women. 2024. "Women's Rights in Afghanistan: Operational Realities for Aid Agencies." UN Women.
- UN Women. 2025. "Women's Economic Empowerment in Afghanistan: A Remaining Window of Opportunity." February 2025. *UN Women Afghanistan Country Office*. <https://www.unwomen.se/wp-content/uploads/2025/05/womens-economic-empowerment-in-afghanistan.pdf>

- UN Women. n.d. "About UN Women." *UN Women – Asia-Pacific*. Accessed April 3, 2024. <https://asiapacific.unwomen.org/en/about-us/about-un-women-1>.
- Wardani, Rossi. 2024. "Perkembangan Arah Non-Governmental Organization (NGO) Serta Civil Society Di Indonesia: Periode 2024-2025." *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 4: 669–79. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i9.1381>
- Women for Women International. 2018. *Afghanistan Country Profile*. https://www.womenforwomen.org/sites/default/files/2018-08/Afghanistan%20Country%20Profile_0_0.pdf
- Women for Women International. 2019. *Impact Evaluation Of Women For Women International's Economic And Social Empowerment Programme In Afghanistan: An Evidence Brief*. May 2019. https://www.womenforwomen.org/sites/default/files/2019-07/WfWI%20WW%20Evidence%20brief%20FINAL_May2019.pdf.
- Women for Women International. 2021a. "Afghanistan Programs Update—December 20, 2021." <https://www.womenforwomen.org/blogs/afghanistan-programs-update-december-20-2021>
- Women for Women International. 2021b. *Annual Report 2021*. <http://womenforwomen.org/annual-report-2021>
- Women for Women International. 2022a. "Global Advocacy Review 2022." <https://www.womenforwomen.org/global-advocacy-2022-review>
- Women for Women International. 2022b. "Afghanistan One Year On: This Is Not the 'New Normal'." October 11, 2022. <https://womenforwomen.org.uk/blog/afghanistan-one-year-not-new-normal>
- Women for Women International. 2022c. *No One Hears Our Voices: One-Year Update Report*. https://womenforwomen.org.uk/sites/default/files/2022-08/one_year_update_no_one_hears_our_voices_report.pdf
- Women for Women International. 2022d. *No One Hears Our Voices — Afghanistan Report (Final)*. https://www.womenforwomen.org/sites/default/files/2022-03/Women%20for%20Women%20Intl_No-One-Hears-Our-Voices_AFG%20Report-FINAL.pdf

- Women for Women International. 2023a. "*Afghanistan | Women for Women International.*"
<https://www.womenforwomen.org/where-we-work/afghanista>
- Women for Women International. 2023b. *Annual Report 2023.*
<https://womenforwomen.org/annual-report-2023>
- Women for Women International. 2023c. "*Latest Bans in Afghanistan.*" January 4, 2023.
<https://www.womenforwomen.org/node/2209>
- Women for Women International. 2024. "*Afghanistan | Women for Women International.*"
<https://www.womenforwomen.org/where-we-work/afghanistan>
- Women for Women International. n.d.-a. "*Afghanistan: Two Years Later.*"
<https://www.womenforwomen.org/afghanistan-two-years-later>
- Women for Women International. n.d.-b. "*Earn and Save Money.*"
<https://www.womenforwomen.org/earn-and-save-money>
- Women for Women International. n.d.-c. "*Lost in Consultation.*"
<https://www.womenforwomen.org/lost-consultation-international-communitys-failure-engage-afghan-women>
- Women for Women International. n.d.-d. "*Where We Work.*"
<https://www.womenforwomen.org/what-we-do/where-we-work>
- Women Peace Security. 2024. "*Letter to the UN, Security Council and Member States on Women's Rights in Afghanistan.*" June 6, 2024.
<https://www.womenpeacesecurity.org/resource/letter-womens-rights-afghanistan-06-2024/>
- Women for Women International. n.d.-f. "*Zainab Salbi | Women for Women International.*"
<https://www.womenforwomen.org/about/our-team/zainab-salbi>
- Women's International League for Peace and Freedom. 2022. "*HRC51: Statement on Women and Girls in Afghanistan.*" September 12, 2022. WILPF.
https://www.wilpf.org/advocacy_documents/hrc51-statement-on-women-and-girls-in-afghanistan/
- Ziaei, Hadia. 2024. "Ministry Disputes UN Projections of Maternal Mortality Rates Cited By SIGAR." *TOLONews*, November 14, 2024.
<https://tolonews.com/health-191654>.